

**EFEKTIVITAS TINGKAT PENERIMAAN PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN METODE *E-BILLING*
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

**THE EFFECTIVENESS RATE OF PRODUCTS BEFORE AND AFTER THE
USE OF E-BILLING METHOD AT TAX SERVICE PRATAMA OFFICE
MAKASSAR UTARA**

ADI

Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
Jl. Pendidikan Makassar
Email : Adishaja20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode *e-billing* dalam meningkatkan efektivitas realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak sebagai variabel bebas dan *e-billing* sebagai variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) efektivitas penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebelum penggunaan sistem *e-billing* tahun 2011 sebesar 97%, tahun 2012 sebesar 88,29%, tahun 2013 sebesar 68,93%. (2) efektivitas penerimaan pajak ditahun pertama penerapan *e-billing* yaitu 2014 adalah sebesar 1%, tahun 2015 sebesar 7%, tahun 2016 sebesar 74%. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *e-billing* sebesar 88,74% dan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem *e-billing* adalah sebesar 27,33%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-billing* dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Oleh karena itu, Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Kata kunci: E-billing

ABSTRACT

This study aims at finding out the use of e-billing method in increasing the effectiveness of the realization of tax payable as stated in the the Tax Service Office of Makassar Utara. The variables in this research are the independent variables of the receiver as the independent variables and billing as the dependent variables.

The population of this research is the realization of tax payable occurring in the Tax Service Office of Makassar Utara. The sample in this research is the realization of the receipts of the year 2011 to the year 2016. The data collection techniques used was documentation. The data analysis technique used is the effectiveness.

The result of the research show that: (1) the effectiveness of Tax payable in Tax Service Pratama Office Makassar Utara before the application of e-billing system in 2011 amounted to 97%, the year of 2012 was 88,29% and 68,93% in 2013. (2) the effectiveness of tax payable in the first year of e-billing implementation in 2014 which was 102%, 94% in 2015 and 97% in 2016. The average rate of tax payable effectiveness before the use of e-billing was 88.74% and the tax payable effectiveness rate after the application of e-billing was 97,6%. This shows that the use of e-billing system has been able to improve the effectiveness of tax revenue in Tax Service Pratama Office Makassar Utara. Hence, the hypotheses proposed in the study are accepted.

Keywords: E-billing

PENDAHULUAN

Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama warga lainnya mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana untuk membiayai semua keperluan negara. Salah satu sumber dana yang diandalkan oleh Indonesia adalah pajak.

Pajak digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional

pemerintah dan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara terutama di Indonesia.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan sejarah, Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah diterapkan antara lain *official assessment system*, *semi self assessment system* dan *withholding system*, *full self assessment system*. *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu WP dan fiskus. *withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh WP. *Full self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Dari keempat sistem pemungutan pajak diatas, Indonesia menggunakan *self assessment system* dalam pemungutan pajak yang efektif digunakan pada tahun

1984 sampai sekarang. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, sangat disayangkan kesadaran masyarakat sebagai (WP) dalam melaksanakannya masih tergolong rendah. Hal mana bisa kita lihat dari masih banyaknya surat teguran, surat paksa bahkan ada beberapa kasus Dirjen Pajak melakukan eksekusi dengan memenjarakan WP. Selain itu, masih terdapat WP yang mengalami kesulitan dalam menghitung pajak dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik WP maupun pemerintah. Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat WP yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan, bagi mereka yang sudah mengerti mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), berikut adalah tingkat realisasi penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat Tahun 2011-2015
(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	(%)	Kategori Efektivitas
2011	878.685.216	873.873.892	72,18	Kurang Efektif
2012	1.016.237.341	980.518.133	73,27	Kurang Efektif
2013	1.148.364.681	1.077.306.679	74,87	Kurang Efektif
2014	1.246.106.955	1.146.865.769	73,96	Kurang Efektif
2015	1.489.255.488	1.240.418.857	82,25	Cukup Efektif

Sumber: www.kemenkeu.go.id (data diolah)

Pada Tabel 1 menggambarkan penerimaan pajak di Indonesia, bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Kemudian jika dilihat dari sisi persentase efektivitas terjadi fluktuasi. Mulai pada tahun 2011 hingga 2014 target pajak mampu direalisasikan sebesar 72%-74% yang dapat dikategorikan kurang efektif, namun pada tahun 2015 target pajak dapat direalisasikan sebesar 82,25% yang dapat dikategorikan cukup efektif.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kepatuhan WP membayar pajak dan potensi pajak di suatu negara adalah rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Menurut Halim (2014) rasio pajak negara-negara maju mencapai 30 persen, rasio pajak Negara tetangga berkisar 15 persen, sementara negara kita Indonesia pada tahun 2011 dan 2012 masih berkisar 12,3 persen. Rendahnya rasio pajak di Indonesia mengindikasikan bahwa WP belum sepenuhnya patuh dan masih adanya potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Demi memaksimalkan penerimaan pajak dan meminimalkan segala kesalahan dalam proses pembayaran pajak, berbagai strategi diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar sistem pendaftaran, perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, ringkas serta mengutamakan kenyamanan WP dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-system*. Dalam *E-system* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*,

dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia.

E-system adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-registratikon* adalah sistem pendaftaran WP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP yang dapat diakses pada laman <https://ereg.pajak.go.id>. *E-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses pada laman <https://efiling.pajak.go.id>. *E-SPT* adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP yang dapat di *download* pada laman www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara elektronik melalui *internet banking*, *teller bank* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh WP. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi WP dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses di manapun WP berada dan kapanpun WP akan melaksanakan pembayarannya.

Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem *online* melalui *e-billing*, beberapa Bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) serta PT Pos Indonesia, masih akan terus melayani

pembayaran pajak secara manual hanya sampai 30 Juni 2016. Hal ini dilakukan oleh DJP dikarenakan proses sosialisasi mengenai sistem *e-billing* belum merata kesemua WP yang terdaftar.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara adalah unit kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan

Tenggara (KANWIL DJP

SULTANBATARA) yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai WP maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerjanya. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara tahun 2013-2014 dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah *E-billing* pada KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2013-2014 (dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi		Total Realisasi Penerimaan Pajak	(%)
		SSP	<i>E-billing</i>		
2013	700.432	482.831	-	482.831	68,93
2014	612.866	619.779	7.457	627.236	102,34
Jumlah	1.313.298	1.102.610	7.457	1.110.067	-

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Utara (data diolah)

Berdasarkan data Tabel 2 tampak adanya peningkatan penerimaan pajak setelah

kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing*.

METODE

A. Desain dan Lokus Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data secara keseluruhan. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pada umumnya penelitian kuantitatif dilaksanakan juga sebagai penelitian komparatif. Menurut Sugiyono (2012:92) “Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.”

2. Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

yang merupakan unit kerja dari KANWIL DJP SULTANBATARA yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai WP maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerjanya.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas tingkat realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak sebelum (periode tahun 2011-2013) dan sesudah (periode 2014-2016) penggunaan *e-billing* yang dapat dilihat dari Modul Penerimaan Negara (MPN) KPP Makassar Utara.

2. Deskripsi Fokus

- a) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang ingin dicapai.
- b) *E-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*.
- c) SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

C. Indikator Fokus

Adapun indikator fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sistem *e-billing*
- 2) Target penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan *e-billing*
- 3) Realisasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan *e-billing*

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, di mana data ini diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai dokumen dan literatur yang tersedia. Data dalam penelitian ini berupa laporan penerimaan pajak yang bersumber dari MPN KPP Makassar Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi sehubungan dengan penelitian

ini, maka digunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu kumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen yang bersumber dari MPN.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo dalam Sujarweni (2015:33) yang dimaksud dengan analisis data adalah “Sebuah kegiatan untuk mengatur, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab”.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan, sehingga dapat memberikan penilaian mengenai efektivitas tingkat penerimaan pajak pada KPP Makassar Utara tahun 2011-2016.

Rasio efektivitas tingkat penerimaan pajak ini mengukur kemampuan KPP Pratama Makassar Utara dalam merealisasikan penerimaan pajak. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. Rasio efektifitas tingkat penerimaan pajak KPP Makassar Utara dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas penerimaan pajak menunjukkan kemampuan KPP Pratama Makassar Utara dalam memobilisasi

penerimaan Pajak, nilai efektifitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kategori Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
90 % - 100%	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2010)

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan tentang sistem *e-billing* yang diterapkan oleh KPP Pratama Makassar Utara.
- 2) Mengumpulkan data target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara tahun 2011 – 2016.

- 3) Menganalisis rasio efektivitas antara target dan realisasi penerimaan pajak dalam menilai tingkat efektivitas yang dicapai.
- 4) Menyimpulkan apakah sistem *e-billing* dapat meningkatkan efektivitas realisasi penerimaan pajak atau tidak.

HASIL

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Utara

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak di sekitar provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama “*Inspectie Van Financien*”.

Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional

menjadi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang untuk daerah tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian. Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI Nomor KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para WP yang tersebar di kota-kota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang, yaitu kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km. 4 Makassar dengan satu

gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.

Sejak tahun 2002, KPP dengan modernisasi administrasi perpajakan, dilakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi antara Kantor Wilayah dan KPP sebagai unit operasional perpajakan di lapangan. Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan *good governance*, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antara kedua unit vertikal DJP tersebut yang menjelas area (domain) kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga selain menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern (*international control*) perpajakan nasional.

Modernisasi perpajakan di lingkup Kantor Wilayah pertama kali diimplementasikan dengan membentuk Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Regional Office*, LTRO) melalui SK Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002. Implementasi modernisasi ini sekaligus sebagai *pilot project*, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya kekurangan atau hambatan. Kemudian, diimplementasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.01/2006.

2. Visi, Misi, dan Nilai

Visi misi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Nilai KPP Pratama Makassar Utara antara lain sebagai berikut:

- a) **Integritas**
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.
- b) **Profesionalisme**
Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas serta pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.
- c) **Inovasi**
Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternative pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
- d) **Teamwork**
Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun *network* untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama

Makassar Utara

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Makassar Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) **Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan**

- objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 - c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelohan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
 - d) Penyuluhan perpajakan.
 - e) Pelaksanaan registrasi WP.
 - f) Pelaksanaan ekstensifikasi.
 - g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
 - h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
 - i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP.
 - j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
 - k) Pelaksanaan insensifikasi.
 - l) Pembetulan ketetapan pajak.
 - m) Pengurangan PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 - n) Pelaksanaan administrasi kantor.

1. Penerimaan Pajak Sebelum

Penggunaan Sistem *E-billing*

Efektivitas tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum penggunaan sistem *e-billing* dapat diketahui dengan data target penerimaan pajak dan data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011-2012.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan *E-billing* Tahun 2011-2013

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Total Realisasi Penerimaan Pajak	Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas
2011	Rp 845.396.235.034,00	Rp 820.074.084.989,00	97	Efektif
2012	Rp 639.118.529.456,00	Rp 564.337.230.937,00	88,29	Cukup Efektif
2013	Rp 700.432.602.058,00	Rp 482.831.277.198,00	68,93	Kurang Efektif
Rata-rata			84,74	Cukup Efektif

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Utara (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 4, data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara mengenai tingkat target dan penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *e-billing* dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara sebesar Rp820.074.084.989,00 dari target yang

telah ditetapkan sebesar Rp845.396.235.034,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak 97% dapat dikategorikan Efektif.

Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara sebesar mengalami penurunan sebesar Rp255.736.854.052,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp639.118.529.456,00 dengan tingkat

efektivitas realisasi penerimaan pajak 88,29% dapat dikategorikan Cukup Efektif. Penurunan tingkat efektivitas ini terjadi karena penerimaan jenis pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Dalam Negeri, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25/29 Orang Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPnBM Impor, PPN Lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara sebesar Rp482.831.277.198,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp700.432.602.058,00 dengan tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak 68,93%, dapat dikategorikan Kurang Efektif. Berbeda dengan 2 tahun terakhir, rendahnya tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2013 disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 cukup rendah dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012. Rendahnya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh:

- a) Masih digunakannya sistem SSP oleh WP dalam membayar pajak. Sistem SSP sendiri memiliki kelemahan seperti terjadinya kurang bayar oleh WP dalam membayar pajaknya dan berakibat pada berkurangnya realisasi penerimaan pajak.
- b) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami kenaikan pada tahun 2013 yang diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

- c) Peralihan PBB sebagai pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.07/2012 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
- d) Perubahan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 1% yang bersifat final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang sebelumnya tarif pajak UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Penerimaan Pajak dengan Penggunaan Sistem *E-billing*

Efektivitas tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara dengan penggunaan sistem *e-billing* dapat

diketahui dengan menggunakan data target penerimaan pajak dan data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014-2016:

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak dengan Penggunaan *E-billing* Tahun 2014-2016 (dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak		Total Realisasi	Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas
		SSP	<i>E-billing</i>			
2014	612.866	619.779	7.457	627.832	102	Sangat Efektif
2015	969.887	843.857	69.534	913.391	94	Efektif
2016	1.286.550	305.875	948.376	1.254.251	97	Efektif
Rata-rata					97,6	Efektif

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Utara (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 5, data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara mengenai tingkat target dan penerimaan pajak dengan penggunaan sistem *e-billing* dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara adalah sebesar Rp627.832.178.466,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp612.866.353.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 102% yang termasuk dalam kategori Sangat Efektif.

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara adalah sebesar Rp913.391.704.064,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp969.887.648.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 94% yang termasuk dalam kategori Efektif.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara adalah sebesar Rp1.254.251.894.457,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp969.887.648.000,00 dengan tingkat

efektivitas penerimaan pajak sebesar 97% yang termasuk dalam kategori Efektif.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan *E-billing*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum penggunaan sistem *e-billing* tahun 2011-2013 adalah sebesar 84,74% yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Penerimaan pajak pada tahun 2011-2013 tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan dan terus mengalami penurunan. Dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8,71%, dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 19.36%. Efektivitas penerimaan pajak terbesar sebelum penggunaan sistem *e-billing* terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 97% sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 68,93%.

Efektivitas penerimaan pajak yang terus menurun dari tahun 2011-2013 disebabkan oleh beberapa faktor, antara

lain adalah masih diterapkannya sistem SSP dalam pembayaran pajak yang memungkinkan terjadinya kurang bayar oleh wajib pajak dan peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan. Untuk mengatasi masalah yang timbul dikarenakan sistem SSP, pada tahun 2014 KPP Pratama Makassar Utara mulai menerapkan sistem *e-billing* sebagai solusi untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

2. Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Penggunaan *E-billing*

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat pada Tabel 5, rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem *e-billing* pada tahun 2014-2016 mencapai sebesar 97,6% yang termasuk dalam kategori Efektif. Efektivitas tingkat penerimaan pajak menggunakan sistem *e-billing* pada tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi, dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8%, sedangkan dari

tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3%. Efektivitas penerimaan pajak terbesar dengan penggunaan sistem *e-billing* terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 104% sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 94%.

Dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas tingkat penerimaan pajak pada saat diterapkannya sistem *e-billing* adalah sebesar 97,6%. Meskipun rata-rata efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dalam kategori Efektif, akan tetapi besarnya tingkat efektivitas pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2016 belum sepenuhnya melalui sistem *e-billing*. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sistem *e-billing* berkontribusi sebesar 27,33% terhadap rata-rata tingkat efektivitas. Dari uraian ini dapat dilihat bahwa penggunaan sistem *e-billing* dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode *e-billing* pada KPP Pratama Makassar Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Makassar Utara masih terus berupaya membantu WP dalam menggunakan sistem *e-billing* yang sebelumnya masih menggunakan sistem SSP melalui bagian *Help Desk* dan kelas pajak yang disediakan oleh KPP Pratama Makassar Utara.
2. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem *e-billing*

pada KPP Pratama Makassar Utara untuk tahun 2011-2013 adalah sebesar 84,74% dan dengan penggunaan sistem *e-billing* pada tahun 2014-2016 adalah sebesar 97,6%, akan tetapi besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2016 belum sepenuhnya melalui sistem *e-billing*. Dengan demikian, Penggunaan sistem *e-billing* dapat meningkatkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebesar 12,86%.

SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah

diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Makassar Utara perlu terus meningkatkan pelayanan sistem *e-billing*, mengingat tingkat efektivitas penerimaan pajak menggunakan sistem *e-billing* pada tahun 2014-2016 masih sebesar 27,33% dan saat ini pembayaran pajak hanya bisa dilakukan dengan sistem *e-billing*.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengadakan pengkajian lebih mendalam terkait peran penerapan sistem *e-billing* dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di atas tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul, Kusufi Syam Muhammad. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: IAI
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Metodologi Penelitian-Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ulum. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Sumber lain

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009.
- Peraturan No. 26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 242
tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak. Jakarta: Menteri
Keuangan.

www.kemenkeu.go.id

www.online-pajak.com

Peraturan Menteri Keuangan RI No.
467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja Keuangan.
Jakarta: Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
162/PMK.011/2012 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak. Jakarta: Menteri
Keuangan.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI
Nomor 127/PMK.07/2012 dan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor
53 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 186/PMK.07/2010
dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Tahapan Persiapan Pengalihan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
Jakarta: Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun
2013 tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu.

Dara Ayu Mentari. 2016. *Analisis
Pengaruh Penerapan Metode E-
Billing dan Manual Wajib Pajak
Badan terhadap Penerimaan Pajak
(Studi Pada Kantor Pelayanan
Pajak Penanaman Modal Asing
Enam, Jakarta)*. Skripsi,
Universitas Lampung.

www.pajak.go.id